

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor ekonomi suatu negara akan terus berubah sesuai dengan perkembangan ekonomi global yang terus bergerak dinamis. Perubahan tersebut tentunya bergerak sesuai dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah maupun kondisi regional yang mentransformasi kegiatan ekonomi dan usaha menjadi lebih berkembang dan efisien. Transformasi yang terjadi karena adanya perpindahan barang dan jasa melewati batas negara yang berimplikasi terhadap proses perkembangan ekonomi suatu negara.

Perkembangan ekonomi yang baik dan terencana disusun dengan menggunakan penetapan kebijakan dan strategi pemerintah. Kajian strategis yang dibangun dengan memperhatikan potensi dan keunggulan daerah yang komprehensif akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Kebijakan pengelolaan sumber daya yang tepat mampu menyerap tenaga kerja dengan cara penciptaan produk dan jasa dalam bentuk komoditas yang bernilai tambah.

Kebijakan strategis ekonomi dengan cara membangun industri (industrialisasi) daerah dibangun berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan Pemerintah Daerah Tingkat II menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota (RPIK). RPIK dibangun berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) untuk tingkat Nasional dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) untuk tingkat Provinsi.

Penyusunan RPIK merupakan prioritas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota yang disusun untuk membangun industri. Pelaksanaan RPIK dilakukan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) melalui program dan rencana strategis oleh SKPD.

Sektor industri merupakan salah satu sektor kunci yang terlibat dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor ini tentunya sangat peka terhadap perubahan internal dan eksternal sehingga berkontribusi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

suatu wilayah. Nilai sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan harga berlaku untuk tahun 2016 adalah 8,14%. Sektor tersebut secara kontribusi menempati peringkat keempat setelah sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor konstruksi.

Jika melihat perkembangan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan, kontribusi sektor industri terus mengalami penurunan dari 8,69% pada tahun 2012 hingga menjadi 8,06% pada tahun 2015 dan meningkat kembali pada tahun 2016 sebesar 8,14%. Hal tersebut terindikasi adanya perlambatan pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Pesisir Selatan.

Faktor eksternal perlambatan tersebut salah satunya adalah lesunya pasar ekonomi global. Namun efek faktor tersebut bisa diminimalisir apabila faktor internal dibenahi. Pembebanan sektor industri yang harus dikerjakan tentunya tidak terlepas dari kualitas dan ketersediaan dan sumber daya alam dan manusia, fasilitas fisik industri, kebijakan yang mendukung pembangunan. Selain itu birokrasi dan regulasi yang menyangkut kelembagaan, kerjasama dan pengembangan wilayah menjadi faktor yang harus diperhatikan.

Kebijakan strategis Kabupaten Pesisir Selatan yang disusun dalam bentuk RPIK digunakan untuk memecah, mengurai dan memberikan alternatif solusi dari permasalahan industri, sehingga kebijakan tersebut berdampak positif dalam kontribusi pertumbuhan sektor industri Kabupaten Pesisir Selatan. RPIK harus disusun, dilaksanakan dan diimplementasikan secara terstruktur dan komprehensif berdasarkan potensi daerah berdasarkan komoditas unggul. menjadi pertimbangan kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program dengan pembiayaan yang tepat, sehingga keterbatasan dana daerah dapat dialokasikan secara optimal kepada sektor prioritas. Kebijakan dengan memperhatikan kebutuhan, logistik serta pasar industri menjadikan rencana aksi dan program menjadi harmonis, terstruktur dan komprehensif sehingga menciptakan hubungan antar sektor yang kuat dan stabil.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana merancang strategi yang mampu

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengembangkan potensi industri di daerah tersebut.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan perencanaan, strategi pengembangan dan strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam sektor industri yang akan digunakan sebagai dasar keputusan penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kota/Kabupaten (RPIK) Kabupaten Pesisir Selatan periode 2017-2037.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini disusun dengan membatasi masalah yang dibahas. Pembatasan tersebut terdiri dari:

1. Data yang digunakan berdasarkan data yang di *publish* oleh BPS periode 2012-2017.
2. Cakupan wilayah penelitian adalah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. Bab tersebut memiliki tujuan yang berbeda yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penelitian dengan diikuti oleh perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang landasan teori yang digunakan berkaitan dengan penelitian. Sumber teori tentunya bersumber dari buku, jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Bab ini digunakan sebagai dasar teori untuk menunjang metodologi, pengolahan data, analisis dan penarikan kesimpulan penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang deskripsi, sumber dan jenis data. Selain itu variabel yang digunakan, metode pengumpulan, pengolahan dan analisis data termasuk ke dalam bab ini.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi data yang digunakan, analisis data dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

